

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia telah terjalin sejak pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 dan berkembang secara dinamis seiring keduanya berposisi sebagai *close neighbors*. Letak geografis kedua negara yang berdekatan turut memainkan peran dalam terjalinnya hubungan bilateral Australia-Indonesia (Pangesti & Ribawati, 2024, p. 69). Meskipun terbelah bertetangga, kedua negara memiliki beragam perbedaan, seperti kebudayaan, kepercayaan yang diyakini, struktur pemerintahan, pola perekonomian, sampai kekuatan militer dan sistem pertahanan. Dalam praktiknya, relasi Australia-Indonesia sering kali mengalami pasang surut yang kerap menyerupai pola *roller coaster* (Darmawan & Mitzy, 2024, p. 93). Dinamika yang fluktuatif tersebut pada akhirnya mendorong kedua negara untuk membangun kerangka kerja sama yang lebih terstruktur dan jangka panjang guna menjaga stabilitas hubungan bilateral di tengah perbedaan yang ada.

Dinamika hubungan bilateral Australia-Indonesia sering kali dipicu oleh isu keamanan historis, seperti penolakan keras Indonesia terhadap invasi Australia ke Timor Timur pada 1975 yang menciptakan trauma diplomatik berkepanjangan dan ketidakpercayaan mendalam (Kingsbury, 2001, p. 45). Selain itu, perbedaan kepentingan ekonomi menjadi katalisator konflik, di mana sengketa perdagangan seperti pembatasan ekspor sapi hidup dari Australia ke Indonesia pada 2011 memicu ketegangan bilateral signifikan (DFAT, 2023, p. 112). Tantangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik, termasuk persaingan pengaruh dengan China dan isu Laut China Selatan, turut menambah lapisan kompleksitas pada relasi keduanya (Connelly, 2022, p. 203). Pandemi COVID-19 juga sempat menguji ketahanan hubungan melalui perbedaan kebijakan perbatasan dan vaksinasi yang memicu kritik publik (Sebastian & Gindarsah, 2021, p. 156). Meskipun demikian, momen-momen krisis ini sering diikuti oleh upaya rekonsiliasi, seperti dialog tingkat tinggi yang menekankan nilai-nilai bersama sebagai negara demokrasi. Fluktuasi dinamika ini menuntut pendekatan diplomasi adaptif dan proaktif untuk mencegah eskalasi konflik jangka panjang.

Seiring berjalannya waktu, hubungan Australia dan Indonesia terus diperkuat melalui kerangka *Comprehensive Strategic Partnership* (CSP) yang menempatkan kerja sama keamanan, ekonomi, dan hubungan antar-warga sebagai pilar utama hubungan bilateral kedua negara. Dalam bidang keamanan, kedua negara menegaskan kembali komitmen terhadap *Lombok Treaty* melalui pembaruan kerja sama intelijen dan penandatanganan ulang *Memorandum of Understanding* tentang penanggulangan terorisme dan ekstremisme kekerasan pada September 2021. Pada tahun yang sama, Australia dan Indonesia juga memperkuat koordinasi regional dengan menandatangani *Memorandum of Understanding on Trilateral Cooperation with the Pacific* sebagai bagian dari respons bersama terhadap dinamika strategis Indo-Pasifik. Di bidang ekonomi, implementasi *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) terus didorong sebagai instrumen utama peningkatan perdagangan dan investasi dua arah. Keseluruhan perkembangan ini mencerminkan upaya kedua negara untuk menjaga stabilitas hubungan bilateral di tengah tantangan global pasca-pandemi COVID-19 (Department of Foreign Affairs and Trade, 2024).

Pada periode 2023-2024, hubungan Australia dan Indonesia semakin diperdalam melalui kerja sama ekonomi hijau dan transisi energi berkelanjutan. Peluncuran *Australia-Indonesia Climate and Infrastructure Partnership* (KINETIK) pada Maret 2024 menjadi tonggak penting dalam mendukung prioritas infrastruktur dan target transisi energi Indonesia menuju net zero. Di bidang pertahanan, penandatanganan *Defence Cooperation Agreement* pada Agustus 2024 memperkuat interoperabilitas militer kedua negara dalam bidang keamanan maritim, bantuan kemanusiaan, dan penanggulangan bencana. Kerja sama ekonomi juga terus berkembang, ditandai dengan peningkatan nilai perdagangan dua arah dan penguatan investasi Australia di Indonesia yang mencapai lebih dari satu miliar dolar Australia pada 2024. Sejalan dengan perkembangan tersebut, periode 2021-2024 mencerminkan konsistensi kedua negara dalam membangun hubungan bilateral yang adaptif terhadap perubahan global dan regional (Department of Foreign Affairs and Trade, 2024).

Hubungan antar warga Australia dan Indonesia selama 2021-2024 tetap menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan hubungan bilateral. Program

pendidikan seperti *Australia Awards Indonesia*, *New Colombo Plan* (NCP), dan pendirian kampus universitas Australia di Indonesia menunjukkan komitmen jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Selain itu, peningkatan mobilitas masyarakat pasca-pandemi tercermin dari tingginya jumlah kunjungan wisatawan Australia ke Indonesia pada 2024-2025. Lembaga seperti Australia-Indonesia Institute terus memainkan peran strategis dalam memperkuat pemahaman budaya dan dialog lintas masyarakat (Department of Foreign Affairs and Trade, 2024). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pendekatan diplomasi yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mengedepankan pentingnya aspek sosial dan budaya antar warga negara sebagai fondasi hubungan jangka panjang.

Dalam perspektif klasik, diplomasi itu sendiri dipahami sebagai seni sekaligus praktik dalam mengelola hubungan antar negara melalui jalur negosiasi damai. Kissinger (1994) menyatakan bahwa diplomasi merupakan sarana bagi negara untuk menyeimbangkan kekuasaan dan kepentingan melalui komunikasi strategis yang bertujuan menghindari konflik serta mencapai stabilitas internasional. Peran diplomasi tidak hanya terbatas sebagai instrumen kebijakan luar negeri, tetapi juga sebagai mekanisme penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dengan tatanan global, sekaligus membentuk citra dan persepsi suatu negara di mata dunia. Dalam pandangan penulis, diplomasi tidak hanya menjadi alat politik luar negeri, tetapi juga mencerminkan cara suatu negara menampilkan identitas dan nilainya kepada dunia. Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk dan pelaku diplomasi pun mengalami evolusi, diikuti dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat serta aktor non-negara dalam dinamika hubungan internasional.

Perubahan praktik diplomasi di era globalisasi tercermin dalam pergeseran fokus dari relasi antar-negara semata, seperti yang dikatakan Melissen, bahwa:

*“the basic distinction between traditional diplomacy and public diplomacy is clear: the former is about relationships between the representatives of states, whereas the latter targets the general public in foreign societies and more specific non-official groups, organizations and individuals”* (Melissen, 2005, p. 5).

Transformasi tersebut menandai kemunculan diplomasi publik sebagai bentuk baru yang dipahami sebagai gejala perubahan dalam praktik hubungan internasional, sekaligus menunjukkan bahwa publik asing kini memiliki arti penting bagi para praktisi diplomasi dengan cara yang sebelumnya hampir tidak terpikirkan hingga sekitar dua setengah dekade lalu. Dalam hal ini, dimensi sosial dan persepsi publik menjadi penting karena *“public diplomacy builds on trust and credibility, and it often works best with a long horizon”*, sementara titik tolaknya berada pada *“the perceiving end, with the foreign consumers of diplomacy”* (Melissen, 2005, pp. 7 & 15). Berbeda dengan diplomasi tradisional yang cenderung bersifat tertutup dan elitis, diplomasi publik menekankan keterlibatan dan dialog karena *“the new public diplomacy moves away from peddling information to foreigners towards engaging with foreign audiences”* serta menuntut bahwa *“success in diplomacy means openness and transnational cooperation”* (Melissen, 2005, pp. 5 & 13). Dalam kerangka ini, diplomasi kontemporer mencerminkan perubahan paradigma yang bersifat fundamental, di mana praktik diplomasi beroperasi dalam lingkungan jaringan yang tidak lagi bertumpu pada model hubungan internasional yang hierarkis dan berpusat pada negara, serta melibatkan beragam aktor karena baik aktor non-negara, supranasional, maupun subnasional kini mengembangkan kebijakan diplomasi publik mereka sendiri.

Lebih jauh lagi, diplomasi publik menempatkan masyarakat sebagai aktor sekaligus target utama dalam proses komunikasi antar-negara, sehingga hubungan internasional tidak lagi semata-mata dijalankan melalui interaksi formal antar pemerintah. Melalui berbagai instrumen seperti program pendidikan, kegiatan budaya, pariwisata, serta pertukaran pemuda, diplomasi publik berupaya membangun jembatan pemahaman lintas budaya yang mampu memperkuat kepercayaan dan kerja sama antarbangsa. Dalam hal ini, konsep *soft power* menjadi landasan teoretis yang penting karena menekankan bentuk pengaruh yang dibangun melalui daya tarik, bukan melalui paksaan atau tekanan. Nye (2004, p. x) mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan melalui daya tarik budaya, nilai-nilai politik, serta kebijakan yang dipandang sah dan bermoral oleh pihak lain. Atas dasar pemahaman tersebut, *soft power* menjadi pilar utama dalam praktik diplomasi publik yang berorientasi pada

pengaruh kultural dan legitimasi moral dalam dinamika hubungan internasional saat ini.

Praktik diplomasi publik dan pemanfaatan *soft power* dapat diamati secara konkret dalam kebijakan luar negeri berbagai negara, salah satunya Australia yang secara konsisten menjadikan diplomasi publik sebagai instrumen utama dalam membangun pengaruh dan hubungan internasionalnya, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Strategi ini diwujudkan melalui upaya mempromosikan nilai-nilai demokrasi, memperkuat kerja sama di bidang pendidikan, serta menyelenggarakan berbagai program pertukaran pemuda yang berperan dalam mempererat hubungan sosial dan budaya lintas negara. Nicholas Cull menekankan bahwa diplomasi publik modern berorientasi pada keterlibatan publik asing melalui komunikasi dua arah yang berkelanjutan dan berfokus pada pembangunan hubungan serta kepercayaan jangka panjang (Cull, 2009, pp. 12-13). Salah satu bentuk nyata dari penerapan strategi tersebut tampak dalam kebijakan *Work and Holiday Visa* atau disingkat dengan WHV yang merupakan bagian dari program *Working Holiday Maker* (WHM). Program ini dirancang untuk memperluas jangkauan diplomasi Australia dari tataran politik formal menuju interaksi sosial-budaya yang lebih terbuka dan inklusif.

Program WHM dibentuk pada 1 Januari 1975 sebagai sebuah program pertukaran budaya yang bertujuan meningkatkan reputasi internasional Australia serta memperkuat hubungan bilateral dengan negara dan kawasan mitra, sekaligus memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk bepergian dan melakukan pekerjaan atau studi jangka pendek guna mendukung pengalaman liburan mereka (Parliament of the Commonwealth of Australia, 2020, p. 13). Selain dimensi pertukaran budaya, program ini juga memiliki fungsi ekonomi yang penting karena para peserta WHM berperan signifikan dalam mengisi kekurangan tenaga kerja di Australia, khususnya di sektor hortikultura dan pertanian, sebagai tenaga kerja yang bersifat fleksibel dan sementara (Parliament of the Commonwealth of Australia, 2020, p. v). Program WHM terdiri atas dua jenis visa, yaitu *Working Holiday Visa* (*Subclass 417*) dan *Work and Holiday Visa* (*Subclass 462*), yang menjadi kerangka utama pelaksanaan kebijakan ini (Australian Government, n.d.). Visa *Subclass 417* diberikan kepada sejumlah negara mitra tertentu dengan kuota yang tidak dibatasi,

sedangkan visa *Subclass* 462 dijalankan melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara mitra yang ditetapkan serta disertai batas kuota tahunan (Parliament of the Commonwealth of Australia, 2020, pp. 9-10 & 14). Dalam pelaksanaannya, visa *Subclass* 462 menetapkan persyaratan tambahan bagi pemohon, seperti penyelesaian pendidikan pasca-sekolah menengah, kemampuan bahasa Inggris yang memadai, serta dalam kondisi tertentu ada kewajiban untuk menyertakan surat dukungan dari pemerintah negara asal (Parliament of the Commonwealth of Australia, 2020, p. 9).

Apabila ditinjau dari perspektif *soft power*, WHV dapat dipahami sebagai salah satu strategi Australia dalam menjangkau generasi muda di seluruh dunia, termasuk Indonesia melalui pengalaman langsung bekerja dan berinteraksi lintas budaya. Program ini membuka ruang keterlibatan yang bersifat personal dan berkelanjutan, di mana peserta tidak hanya memperoleh pengalaman profesional, tetapi juga membangun relasi sosial selama tinggal di Australia. Relasi tersebut berpotensi berkembang menjadi jejaring alumni yang dalam jangka panjang berfungsi sebagai “duta informal” Australia di Indonesia, terutama melalui cerita, pengalaman, dan persepsi yang mereka bagikan sepulangnya ke tanah air. Kehadiran relasi semacam ini diyakini dapat memperkuat persepsi positif terhadap nilai-nilai serta karakter masyarakat Australia, sejalan dengan pandangan Cowan dan Arsenault yang menekankan bahwa diplomasi publik yang efektif bertumpu pada keterlibatan publik asing melalui dialog dan kolaborasi yang membangun pemahaman timbal balik, kepercayaan, dan hubungan jangka panjang antar warga negara (Cowan & Arsenault, 2008, p. 11). Dalam satu sudut pandang tertentu, menjadi penting untuk menelaah lebih jauh apakah WHV benar-benar berkontribusi dalam memperkuat hubungan bilateral Australia-Indonesia atau justru lebih dominan berfungsi sebagai instrumen kepentingan ekonomi Australia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja sementara di tengah dinamika internasional yang terus berubah.

Dinamika internasional selalu dipengaruhi oleh kondisi global yang dapat berubah dengan cepat, baik dalam situasi yang menguntungkan maupun sebaliknya, salah satunya ketika dunia menghadapi pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Pandemi ini membawa dampak besar terhadap pelaksanaan program WHM,

termasuk bagi peserta asal Indonesia yang terdampak langsung oleh kebijakan penutupan perbatasan Australia. Berdasarkan data dari Department of Home Affairs, jumlah pemegang WHV (*Subclass 462*) asal Indonesia mengalami penurunan signifikan dari 1.585 orang pada tahun 2019 menjadi hanya 964 orang pada tahun 2021 (Department of Home Affairs, 2020). Penurunan ini mencerminkan besarnya dampak pandemi terhadap arus pertukaran pemuda dan interaksi antarwarga negara dalam kerangka kerja sama bilateral. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan Gilboa (2008), bahwa diplomasi publik sebagai instrumen kebijakan luar negeri berfungsi mentransformasikan sumber daya soft power ke dalam praktik konkret, yang sering kali berada di antara ideal normatif membangun saling pengertian lintas budaya dan kepentingan strategis negara (Gilboa, 2008, pp. 61 & 68).

Selama periode 2021-2024, kebijakan WHV *Subclass 462* mengalami beberapa penyesuaian yang cukup penting, terutama sebagai respons Australia terhadap situasi global pasca-pandemi dan upaya pemulihan ekonomi. Perubahan tersebut terlihat dari penyederhanaan prosedur administrasi, perluasan jenis pekerjaan yang masuk dalam kategori *specified work*, serta penyesuaian kuota bagi negara-negara mitra, termasuk Indonesia (Australian Embassy Indonesia, n.d.). Di saat yang sama, Pemerintah Australia juga mulai lebih aktif melakukan kampanye promosi ke tingkat internasional untuk kembali menarik minat generasi muda asing agar mengikuti program ini. Kampanye “*Work and Play the Aussie Way*” diluncurkan oleh Tourism Australia pada 2022 dengan anggaran AUD 7 juta, yang menargetkan peminat asal Inggris, Eropa (Prancis, Jerman, Italia), Jepang, dan Korea Selatan, mempromosikan petualangan kerja dan liburan di Australia sambil memanfaatkan insentif seperti pengembalian biaya visa untuk pemegang WHV yang tiba sebelum April 2022 (Tourism Australia, 2022). Hal ini menempatkan reformasi *Subclass 462* pada periode ini dapat dipahami sebagai bagian dari perubahan pendekatan diplomasi publik Australia, yang tidak lagi hanya mengandalkan promosi budaya secara konvensional, melainkan memanfaatkan pengalaman langsung peserta asing sebagai sarana membentuk persepsi dan memperkuat *soft power*.

Program WHV juga mencerminkan bagaimana Australia memanfaatkan kebijakan imigrasi sebagai instrumen *soft power* untuk membentuk persepsi positif di tingkat internasional. Melalui partisipasi dalam program ini, peminat asal Indonesia memiliki kesempatan untuk merasakan kehidupan masyarakat Australia secara langsung, sementara bagi Australia, program ini memperkuat identitasnya sebagai negara yang terbuka, multikultural, dan ramah terhadap generasi muda dunia. Diplomasi publik yang efektif seharusnya menekankan hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bersama (*mutual benefit*) bagi negara pengirim dan penerima, bukan sekadar menjadi sarana promosi sepihak (Cowan & Arsenault, 2008, p. 11). Namun, pengalaman sebagian peserta yang bekerja di sektor padat karya seperti pertanian menunjukkan adanya dimensi ekonomi yang signifikan di balik implementasi WHV. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik diplomasi pada hakikatnya selalu melibatkan kalkulasi kepentingan nasional yang berjalan beriringan dengan tujuan sosial dan moralnya (Gilboa, 2008, p. 61).

Salah satu kajian kritis menunjukkan bahwa pelaksanaan WHV tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan awalnya sebagai program pertukaran budaya. Dewi dan Setiawati (2020) menegaskan bahwa dalam praktiknya terdapat berbagai bentuk perlakuan tidak setara terhadap pemegang WHV, serta minimnya perlindungan ketenagakerjaan yang memadai bagi peserta program ini. Ketentuan pembatasan kerja maksimal enam bulan pada satu pemberi kerja dinilai berkontribusi terhadap ketidakpastian ekonomi peserta, terutama bagi pemegang visa dari negara berkembang seperti Indonesia yang cenderung bergantung pada pekerjaan di sektor padat karya. Situasi tersebut memunculkan kritik bahwa WHV tidak lagi dapat dipahami semata sebagai program pertukaran budaya, melainkan sebagai bentuk migrasi tenaga kerja sementara yang rentan terhadap eksploitasi (Dewi & Setiawati, 2020, pp. 391-392 & 397-398). Apabila diplomasi publik bertujuan membangun *goodwill* dan kepercayaan antar-warga negara, maka praktik WHV perlu dikaji secara kritis agar tidak justru merusak citra Australia akibat ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami sebagian pesertanya.

Bagi peminat asal Indonesia, partisipasi dalam program WHV memberikan kesempatan untuk mengenal secara langsung sistem sosial, budaya kerja, serta nilai-nilai multikultural yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Australia.

Melalui pengalaman bekerja dan berinteraksi dalam keseharian, peserta berkesempatan memahami etos kerja, praktik toleransi, serta cara masyarakat Australia beradaptasi dalam lingkungan sosial yang beragam, sebagaimana diplomasi publik menekankan keterlibatan langsung dengan publik asing sebagai sarana pembentukan pemahaman (Melissen, 2005, p. 13). Proses ini berpotensi memperkuat jembatan komunikasi antarbudaya dan menciptakan kedekatan sosial antara warga kedua negara melalui interaksi yang bersifat personal dan berkelanjutan. Dalam hal ini, diplomasi publik beroperasi pada tingkat interpersonal, di mana pengalaman individual peserta dapat berkontribusi dalam membentuk persepsi dan citra positif terhadap Australia. Namun demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh Dewi & Setiawati (2020, pp. 387 & 392), keberhasilan diplomasi publik melalui WHV sangat bergantung pada kualitas pengalaman peserta dan sejauh mana program ini mampu memberikan manfaat yang seimbang, mengingat adanya temuan mengenai kerentanan peserta terhadap ketidakpastian kerja dan perlindungan yang terbatas.

Isu ini menjadi penting untuk dibahas karena menyangkut ikhtiar kedua negara untuk meningkatkan hubungan bilateral. Terkait isu yang diangkat mengenai “Diplomasi Publik Australia terhadap Indonesia melalui Skema Visa Bekerja dan Berlibur (2021-2024)”, penulis menemukan beberapa kajian terdahulu yang secara langsung maupun tidak langsung turut ikut menyentuh isu WHV ini. Beberapa di antaranya yaitu, Brennan (2022) yang menyoroti pengalaman peserta WHV di Australia lebih banyak berorientasi pada kepentingan ekonomi daripada tujuan pertukaran budaya. Sementara itu, Vosko (2023) menyoroti bagaimana Australia dan Kanada memanfaatkan skema WHV untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bawah narasi diplomasi budaya. Hingga kini, masih terbatas penelitian yang mengkaji efektivitas WHV sebagai instrumen *soft power* dan diplomasi publik antara Australia dan Indonesia. Keterbatasan inilah yang menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna memahami bagaimana diplomasi publik diwujudkan melalui kebijakan WHV dan bagaimana kebijakan tersebut mencerminkan keseimbangan antara idealisme budaya dan kepentingan nasional Australia.

Periode 2021-2024 menjadi fase penting dalam kajian diplomasi publik Australia karena pada rentang waktu ini kebijakan WHV mengalami sejumlah penyesuaian sebagai respons terhadap kondisi pasca-pandemi COVID-19. Penyesuaian tersebut meliputi pelonggaran persyaratan, peningkatan kuota peserta, serta pemanfaatan promosi digital yang mencerminkan upaya Australia memulihkan mobilitas internasional sekaligus memperluas koneksi sosial lintas negara. Meskipun kebijakan WHV menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, kajian yang secara khusus menelaah perubahan tersebut terhadap dinamika hubungan bilateral Australia-Indonesia masih relatif terbatas. Secara teoretis, Hedley Bull memandang diplomasi sebagai salah satu institusi utama dalam masyarakat internasional yang berfungsi menjaga tatanan internasional melalui komunikasi, negosiasi, dan kerja sama yang berlangsung secara damai dan berkelanjutan antar-negara (Bull, 2002, pp. 156-157). Dalam kerangka pemahaman tersebut, WHV diposisikan sebagai salah satu instrumen diplomasi publik Australia yang berperan dalam membentuk interaksi serta pemahaman lintas budaya antara warga Indonesia dan Australia, sekaligus relevan untuk dianalisis dalam diskursus *soft power* dan diplomasi publik Australia terhadap Indonesia.

Kesenjangan penelitian ini terlihat dari masih terbatasnya kajian empiris yang membahas program WHV secara komprehensif dalam kaitannya dengan dinamika hubungan bilateral Australia-Indonesia. Sejauh ini, sebagian besar studi lebih menekankan aspek ekonomi dan migrasi tenaga kerja, sementara dimensi diplomasi publik dan *soft power* yang melandasi kebijakan ini belum banyak dikaji secara sistematis. Padahal, pendekatan diplomasi publik dan *soft power* memungkinkan pembacaan yang lebih luas melalui analisis kebijakan, wacana diplomatik, serta pengalaman sosial para pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam kerangka tersebut, WHV dapat dianalisis sebagai praktik diplomasi publik dengan meninjau keterkaitan antara desain kebijakan, pelaksanaan program, dan pola interaksi sosial yang terbentuk di dalamnya. Kajian semacam ini membuka ruang untuk memahami posisi WHV dalam mendukung dinamika dan keberlanjutan hubungan bilateral Australia-Indonesia secara lebih utuh.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang menempatkan WHV sebagai instrumen *soft power* dalam konteks diplomasi publik Australia

terhadap Indonesia. Penelitian ini berupaya memahami dan menjelaskan dua dimensi utama, yaitu efektivitas WHV dalam memperkuat diplomasi publik dan relevansinya terhadap dinamika hubungan bilateral pasca-pandemi. Dengan mengaitkan pemikiran Jan Melissen mengenai diplomasi publik sebagai instrumen kepentingan nasional dan konsep *soft power* Joseph Nye, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas pemahaman teoretis tentang interaksi antara idealisme diplomatik dan pragmatisme kebijakan luar negeri. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai diplomasi publik dan hubungan internasional di era kontemporer, sekaligus menegaskan posisi diplomasi publik sebagai bentuk *soft power* yang strategis dalam memperkuat hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia.

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada tindakan yang dilakukan oleh Australia dalam melaksanakan skema WHV *Subclass* 462 terhadap Indonesia pada periode 2021-2024. Kebijakan ini dipahami sebagai langkah konkret Australia dalam memperkuat hubungan bilateral melalui jalur *people-to-people contact* di tengah dinamika global pasca-pandemi COVID-19. Dalam konteks tersebut, WHV tidak hanya diposisikan sebagai instrumen mobilitas tenaga kerja muda, tetapi juga sebagai bagian dari strategi diplomasi publik yang berorientasi pada pembentukan persepsi positif dan penguatan jejaring sosial lintas negara. Australia berupaya memanfaatkan program ini untuk memperluas interaksi sosial, pertukaran budaya, serta mendukung kepentingan ekonomi dan strategisnya di kawasan Indo-Pasifik. Implementasi WHV pada periode ini mencerminkan pemanfaatan *soft power* dalam praktik kebijakan luar negeri yang bersifat non-koersif namun tetap memiliki dimensi kepentingan nasional.

Dalam pelaksanaannya selama periode 2021-2024, pemerintah Australia melakukan berbagai langkah strategis untuk mengoptimalkan kembali daya tarik program WHV bagi mitra, termasuk Indonesia. Upaya tersebut dijalankan melalui penguatan promosi internasional, penyederhanaan prosedur administratif, serta penyesuaian kuota dan mekanisme partisipasi guna mendorong peningkatan jumlah peserta. Peran aktor-aktor seperti Australian Embassy Indonesia turut menjadi signifikan dalam menyebarluaskan informasi dan membangun komunikasi publik

yang lebih intensif. Di sisi lain, keterlibatan lembaga seperti Tourism Australia dalam kampanye global memperlihatkan sinergi antara kepentingan ekonomi, pariwisata, dan diplomasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa WHV tidak semata-mata merupakan kebijakan migrasi sementara, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas dalam membangun citra negara dan memperkuat hubungan Australia-Indonesia melalui pengalaman langsung generasi muda.

### 1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah sebagai berikut:

**“Bagaimana dinamika dan efektivitas *Work and Holiday Visa* (WHV) berperan sebagai instrumen *soft power* dan diplomasi publik dalam hubungan bilateral Australia dan Indonesia?”**

### 1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menjelaskan efektivitas diplomasi publik Australia terhadap Indonesia melalui skema WHV periode 2021-2024. Selain itu, penelitian ini berupaya menelaah bagaimana program WHV diimplementasikan sebagai bagian dari strategi diplomasi publik yang mengedepankan daya tarik budaya, nilai-nilai sosial, dan interaksi antar-warga negara. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini juga bermaksud mengidentifikasi peran WHV dalam membentuk persepsi masyarakat Indonesia terhadap Australia dan persepsi masyarakat Australia terhadap Indonesia sekaligus memperkuat hubungan lintas budaya antara kedua negara. Melalui analisis ini, penulis memiliki harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman konseptual mengenai keterkaitan antara *soft power*, diplomasi publik, dan kepentingan nasional dalam kerangka pelaksanaan kebijakan luar negeri Australia di era pasca-pandemi.

### 1.5. Manfaat Penelitian

#### 1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik yang berkaitan dengan hubungan bilateral kedua negara, dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana kebijakan berbasis mobilitas manusia dan pertukaran budaya dapat berfungsi sebagai instrumen *soft power* dan diplomasi publik dalam

membentuk citra dan pengaruh suatu negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan konseptual bagi studi-studi lanjutan mengenai diplomasi publik dalam konteks kerja sama regional Indo-Pasifik. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi akademik yang relevan dalam mengembangkan teori dan praktik diplomasi kontemporer di era globalisasi.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih luas bagi pembaca dalam memahami bagaimana diplomasi publik dapat berfungsi sebagai strategi untuk memperkuat kerja sama sosial, budaya, dan ekonomi antara Indonesia dan Australia. Selain itu, hasil kajian ini juga dapat menjadi rujukan bagi kalangan praktisi dan lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan potensi program WHV sebagai sarana peningkatan kompetensi global generasi muda Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kepercayaan dan kedekatan antar-warga negara.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai pedoman agar pembahasan tersusun secara logis dan terarah. Penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab utama, yang masing-masing saling berkaitan untuk membentuk satu kesatuan analisis yang utuh. Adapun uraian umum mengenai isi setiap bab adalah sebagai berikut:

#### **BAB 1           PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan hubungan bilateral antara Australia dan Indonesia serta relevansi diplomasi publik melalui skema *Work and Holiday Visa* (WHV) periode 2021-2024. Selain itu, bab ini juga mencakup rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi panduan keseluruhan karya ilmiah ini.

**BAB 2 KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan literatur dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema diplomasi publik, *soft power*, dan *Work and Holiday Visa* (WHV) Australia terhadap Indonesia. Selain itu, bab ini juga membahas kerangka teori yang digunakan, yaitu teori *Soft Power* oleh Joseph Nye (2004) dan *The New Public Diplomacy* oleh Jan Melissen (2005), serta kerangka berpikir yang menjelaskan hubungan antara teori dan permasalahan penelitian.

**BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam studi ini, yaitu pendekatan kualitatif. Di dalamnya dibahas jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen, serta teknik analisis data dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana diplomasi publik Australia dijalankan melalui skema WHV dalam konteks hubungan bilateral Australia-Indonesia.

**BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan hasil analisis mengenai pelaksanaan dan dinamika diplomasi publik Australia terhadap Indonesia melalui program WHV periode 2021-2024. Pembahasan difokuskan pada bagaimana WHV digunakan sebagai instrumen *soft power* Australia, serta kontribusi terhadap pembentukan citra positif dan penguatan hubungan sosial-budaya antara kedua negara. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang telah dijelaskan pada BAB 2 Kajian Pustaka.

**BAB 5 PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum temuan utama penelitian dan memberikan refleksi atas efektivitas diplomasi publik melalui skema WHV sebagai bagian dari strategi *soft power* Australia dan juga berisi jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.